

Rekonstruksi Peran Lembaga Kekaryaannya HMI sebagai Penunjang Inovasi Kebudayaan Masyarakat

Rifa'Atul Mahmudah

Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Adab & Humaniora Cabang Gowa Raya, Indonesia
email: ifatulhuda@gmail.com

Abstrak: Lembaga karya merupakan salah satu instrumen strategis dalam struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berfungsi sebagai wadah pengembangan profesi, penguatan kapasitas kader, serta sarana pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan lembaga karya tidak hanya diarahkan pada pembinaan kompetensi kader dalam berbagai bidang keahlian, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya inovasi sosial dan kebudayaan di tengah masyarakat. Di era perubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan pergeseran nilai budaya, diperlukan upaya rekonstruksi peran lembaga karya agar tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu berkontribusi terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi peran lembaga karya HMI sebagai penunjang inovasi kebudayaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian terhadap literatur, dokumen organisasi HMI, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber akademik yang relevan dengan tema pengembangan organisasi, inovasi kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antara fungsi lembaga karya dan proses inovasi kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga karya HMI memiliki potensi besar dalam menjadi agen perubahan sosial dan kebudayaan melalui pengembangan kapasitas kader, kegiatan pemberdayaan masyarakat, penguatan literasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelestarian nilai-nilai budaya. Rekonstruksi peran lembaga karya diperlukan melalui penguatan orientasi profesionalisme, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pengembangan program-program yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, lembaga karya HMI tidak hanya berfungsi sebagai sarana kaderisasi profesi, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi kebudayaan yang mampu memperkuat identitas masyarakat sekaligus mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Himpunan Mahasiswa Islam, Lembaga Karya, Inovasi Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, Transformasi Sosial.

Pendahuluan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan tidak hanya berfokus pada pembinaan intelektual serta penguatan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, tetapi juga mengembangkan kapasitas profesional kader melalui berbagai instrumen organisasi. Salah satu instrumen tersebut adalah Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), yang pada awal pembentukannya dikenal sebagai lembaga karya. Kehadiran lembaga ini merupakan respons organisasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi kader yang sesuai dengan disiplin ilmu, minat, dan bidang profesi masing-masing. Secara historis, lembaga karya mulai memperoleh legitimasi formal dalam struktur organisasi HMI sejak Kongres HMI ke-VII di Jakarta pada tahun 1963. Dalam perkembangannya, nomenklatur lembaga karya kemudian berubah menjadi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), namun perubahan tersebut tidak mengubah tujuan dasarnya sebagai wadah pengembangan kapasitas dan profesionalitas kader HMI (Sitompul, 1986).

Penguatan peran LPP semakin ditegaskan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI yang disahkan pada Kongres HMI ke-29 di Pekanbaru tahun 2016. Dalam ketentuan organisasi tersebut dijelaskan bahwa LPP merupakan lembaga perkaderan yang berfungsi mengembangkan kompetensi profesional kader sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya. LPP terdiri atas berbagai lembaga yang mencerminkan keragaman bidang pengembangan kader, antara lain

Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI), Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI), Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI), Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI), Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI), Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI), Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), serta Lembaga Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) (PB HMI, 2021).

Keberadaan berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa HMI tidak hanya berorientasi pada pembentukan karakter kader secara ideologis, tetapi juga berupaya membangun kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks organisasi modern, profesionalitas menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan organisasi dalam menjawab tantangan perubahan sosial yang semakin kompleks. Profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui bidang keahlian masing-masing (Drucker, 1999).

Selain menjalankan fungsi perkaderan, LPP juga memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman kelembagaan, melaksanakan akreditasi lembaga di tingkat cabang, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi. Dalam pelaksanaannya, setiap LPP diwajibkan menyelenggarakan program kerja yang relevan dengan bidang profesinya serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada struktur

organisasi yang setingkat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa LPP dirancang sebagai instrumen strategis yang mampu menjembatani antara proses kaderisasi dengan kebutuhan pengabdian sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, pengambilan keputusan dalam tubuh LPP dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang dilaksanakan dalam forum Musyawarah Lembaga. Forum ini merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi pada masing-masing LPP, baik di tingkat Pengurus Besar maupun tingkat cabang. Melalui forum tersebut ditetapkan arah kebijakan, program kerja, serta kepemimpinan lembaga yang akan menjalankan roda organisasi dalam satu periode tertentu. Mekanisme tersebut mencerminkan komitmen HMI terhadap nilai demokrasi organisasi dan partisipasi kader dalam proses pengambilan keputusan (PB HMI, 2021).

Dengan demikian, keberadaan LPP tidak dapat dipandang sebagai lembaga yang berdiri terpisah dari HMI. Sebaliknya, LPP merupakan bagian integral yang memperkuat fungsi kaderisasi, memperluas ruang pengabdian kader, serta meningkatkan kapasitas organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Semangat utama yang melandasi keberadaan LPP adalah profesionalitas yang berorientasi pada karya nyata, sehingga kader tidak hanya mampu membangun wacana intelektual, tetapi juga menghasilkan kontribusi konkret bagi pembangunan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai peran Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai instrumen kaderisasi profesional dan agen inovasi kebudayaan dalam masyarakat. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai konsep, teori, dan pemikiran yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan, pengembangan profesi, inovasi sosial, dan transformasi kebudayaan melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan (Sugiyono, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi organisasi HMI, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI, Pedoman Dasar Lembaga Pengembangan Profesi, serta berbagai keputusan organisasi yang berkaitan dengan fungsi dan peran LPP. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, prosiding seminar, serta berbagai publikasi akademik yang membahas profesionalisme organisasi, pemberdayaan masyarakat, inovasi kebudayaan, dan pengembangan sumber daya manusia (Creswell & Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep lembaga

kekaryaannya, profesionalisme kader, inovasi kebudayaan, serta kontribusi organisasi kemahasiswaan dalam pembangunan masyarakat. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara fungsi LPP dan proses perubahan sosial-budaya dalam masyarakat (Zed, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Data yang telah dikumpulkan direduksi, diseleksi, dan diorganisasikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses interpretasi, komparasi, dan sintesis terhadap berbagai pandangan yang ditemukan dalam literatur. Analisis tersebut bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan relevansi peran LPP dalam mendorong inovasi kebudayaan masyarakat di tengah perkembangan sosial yang dinamis (Miles et al., 2014).

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai informasi yang berasal dari dokumen organisasi, buku ilmiah, serta artikel akademik yang relevan. Melalui proses tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih objektif dan mendalam mengenai rekonstruksi peran Lembaga Pengembangan Profesi HMI sebagai penunjang inovasi kebudayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Pengembangan Profesi HMI

Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) merupakan salah satu instrumen kaderisasi yang memiliki posisi strategis

dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Secara historis, embrio lembaga ini lahir pada Kongres HMI ke-VII di Jakarta tahun 1963 ketika organisasi memandang perlunya wadah yang mampu mengakomodasi pengembangan kompetensi kader berdasarkan bidang keilmuan dan minat profesinya. Pada masa tersebut dibentuk beberapa lembaga khusus yang kemudian berkembang menjadi Lembaga Pengembangan Profesi, seperti Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI), Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI), Lembaga Pembangunan Mahasiswa Islam (LPMI), dan Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI) (Sitompul, 1986).

Kemunculan lembaga-lembaga tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik Indonesia pada dekade 1960-an yang ditandai dengan meningkatnya mobilisasi massa dan keterlibatan organisasi kemahasiswaan dalam berbagai agenda pembangunan nasional. Dalam situasi tersebut, HMI berupaya memperluas ruang aktualisasi kader melalui pendekatan profesional yang lebih terarah. Oleh karena itu, lembaga-lembaga profesi dipandang sebagai sarana untuk menghubungkan kapasitas intelektual mahasiswa dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (PB HMI, 2021).

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa LPP mengalami transformasi kelembagaan yang cukup dinamis. Pada Kongres HMI ke-VIII di Surakarta, lembaga-lembaga profesi memperoleh status otonom yang memungkinkan mereka memiliki struktur organisasi sendiri, menyusun pedoman kelembagaan, serta menyelenggarakan forum musyawarah secara mandiri. Kebijakan tersebut pada

satu sisi mendorong kreativitas dan pengembangan program yang lebih spesifik, namun pada sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya jarak antara lembaga profesi dengan organisasi induknya. Karena itu, dalam berbagai forum evaluasi organisasi pada periode berikutnya ditegaskan kembali bahwa LPP merupakan bagian integral dari HMI dan harus tetap bergerak dalam koridor perjuangan organisasi (Sitompul, 1986).

Memasuki era reformasi, isu profesionalisme menjadi salah satu tema penting dalam pengembangan organisasi mahasiswa. HMI kemudian melakukan revitalisasi terhadap lembaga kekarya dan pada Kongres HMI ke-XXV di Makassar tahun 2006 secara resmi mengubah nomenklatur "Lembaga Kekarya" menjadi "Lembaga Pengembangan Profesi". Perubahan tersebut mencerminkan kebutuhan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pendidikan, dunia kerja, serta tuntutan masyarakat modern yang semakin menekankan kompetensi profesional dan penguasaan keahlian tertentu (PB HMI, 2021).

Fungsi Strategis LPP dalam Pengembangan Kader

Secara normatif, tujuan utama LPP adalah mengoptimalkan potensi kader sesuai dengan disiplin ilmu, minat, dan bakat yang dimiliki. Kehadiran LPP memungkinkan proses kaderisasi tidak hanya berlangsung dalam bentuk pembinaan ideologis dan kepemimpinan, tetapi juga melalui penguatan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kader HMI tidak hanya dibentuk sebagai agen perubahan sosial,

tetapi juga sebagai individu yang memiliki kapasitas teknis dan profesional dalam bidang tertentu.

Dalam perspektif organisasi modern, pengembangan profesionalisme merupakan bagian penting dari proses pembangunan sumber daya manusia. Drucker (1999) menjelaskan bahwa organisasi yang mampu bertahan dan berkembang adalah organisasi yang secara konsisten mengembangkan kompetensi anggotanya agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Konsep ini sejalan dengan peran LPP yang berupaya meningkatkan kualitas kader melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penguatan keterampilan praktis sesuai bidang masing-masing.

Melalui berbagai lembaga yang dimiliki, seperti LAPMI dalam bidang jurnalistik, LTMI dalam bidang teknologi, LEMI dalam bidang ekonomi, maupun LSMI dalam bidang seni dan budaya, HMI memiliki instrumen yang cukup lengkap untuk menghasilkan kader yang adaptif dan kompetitif. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memperluas ruang aktualisasi kader sekaligus menjadi media pengabdian kepada masyarakat secara langsung.

Lembaga Kekarya dan Tantangan Baru Gerakan HMI

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan mahasiswa saat ini menuntut adanya reorientasi gerakan organisasi kemahasiswaan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang banyak terlibat dalam perjuangan politik dan gerakan ideologis, mahasiswa masa kini cenderung memiliki orientasi yang lebih pragmatis, terutama terkait peningkatan kompetensi diri, kesiapan kerja, dan

pengembangan karier. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari berkembangnya masyarakat modern yang semakin kompetitif dan berbasis pengetahuan (Castells, 2010).

Dalam konteks tersebut, LPP dapat menjadi jawaban atas kebutuhan kader yang menginginkan organisasi tidak hanya menjadi ruang diskusi dan aktivitas politik, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas profesional. Penguatan lembaga-lembaga profesi dapat memberikan nilai tambah bagi kader sekaligus meningkatkan daya tarik organisasi di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, revitalisasi LPP perlu diarahkan pada pengembangan program-program yang berbasis kebutuhan aktual mahasiswa, seperti pelatihan teknologi digital, kewirausahaan, literasi media, riset, dan pengembangan kreativitas.

Optimalisasi LPP sebagai Instrumen Inovasi Kebudayaan

Salah satu peran penting LPP yang sering kali kurang mendapatkan perhatian adalah kontribusinya dalam mendorong inovasi kebudayaan masyarakat. Inovasi kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai penciptaan sesuatu yang baru, tetapi juga sebagai proses adaptasi nilai, gagasan, dan praktik sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan identitas budayanya (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam konteks ini, Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI) memiliki posisi strategis dalam mengembangkan kebudayaan yang berakar pada nilai-nilai lokal sekaligus terbuka terhadap perkembangan global. Demikian pula lembaga lain seperti LAPMI dan LTMI dapat berkontribusi

melalui pengembangan literasi digital, dokumentasi budaya, serta pemanfaatan teknologi untuk pelestarian warisan budaya.

Menurut Rogers (2003), inovasi akan berkembang apabila terdapat agen perubahan yang mampu menjembatani ide baru dengan kebutuhan masyarakat. LPP memiliki potensi untuk memainkan peran tersebut melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pendampingan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, inovasi kebudayaan tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada era digital saat ini, inovasi kebudayaan juga menuntut kemampuan memanfaatkan teknologi sebagai media pelestarian dan pengembangan budaya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kader melalui LPP menjadi sangat penting agar kader HMI mampu menjadi aktor perubahan yang tidak hanya memahami persoalan sosial, tetapi juga mampu menawarkan solusi yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) HMI merupakan instrumen strategis dalam mendukung proses kaderisasi yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan pengabdian sosial kader. Kehadiran LPP menunjukkan bahwa HMI tidak hanya berfokus pada pembentukan kapasitas intelektual dan kepemimpinan, tetapi juga memberikan ruang bagi kader untuk mengembangkan kemampuan sesuai bidang keilmuan dan minat profesinya.

Perjalanan historis LPP menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengalami berbagai dinamika, mulai dari proses pembentukan, perkembangan, hingga revitalisasi sebagai bagian penting dalam sistem organisasi HMI. Melalui berbagai lembaga profesi yang ada, kader HMI memperoleh wadah untuk mengaktualisasikan potensi diri sekaligus berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tantangan globalisasi, optimalisasi peran LPP menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. LPP dapat menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas kader agar memiliki daya saing, kreativitas, kemampuan inovatif, dan kepedulian sosial yang tinggi. Dengan demikian, kader tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman, tetapi juga mampu menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat.

Selain itu, LPP memiliki peran penting dalam mendorong inovasi kebudayaan masyarakat. Melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dakwah, advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, LPP dapat menjadi agen transformasi sosial yang menghasilkan pembaruan-pembaruan konstruktif dalam kehidupan masyarakat. Inovasi kebudayaan yang lahir dari aktivitas kader tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan.

Oleh karena itu, rekonstruksi peran LPP perlu terus dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan

kualitas kader, serta sinergi yang lebih kuat antara HMI, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, LPP dapat semakin berfungsi sebagai penunjang inovasi kebudayaan masyarakat sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan perjuangan HMI.

Daftar Pustaka

- Azra, A. (2019). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Kencana.
- Koentjaraningrat. (2015). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Madjid, N. (2008). Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Jakarta: Paramadina.
- Nata, A. (2016). Sosiologi Pendidikan Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. (2016). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam Hasil Kongres XXIX Pekanbaru. Jakarta: PB HMI.
- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). New York, NY: Free Press.
- Sitompul, A. (2018). Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975). Jakarta: Misaka Galiza.
- Soekanto, S. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sztompka, P. (2017). Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media.
- Tilaar, H. A. R. (2015). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.